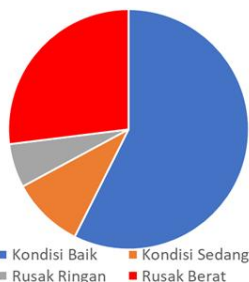




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENAAATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023

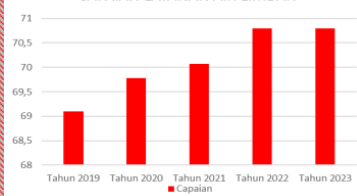
KONDISI JALAN KABUPATEN MINAHASA



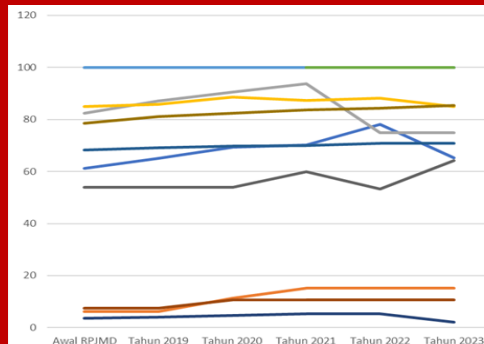
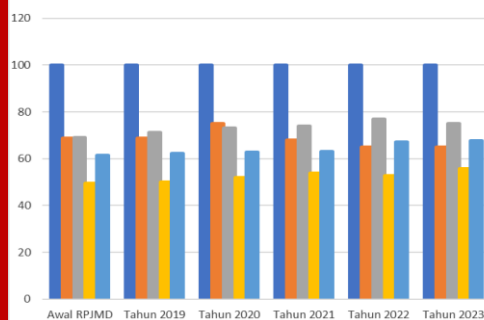
CAPAIAN LAYANAN SPAM



CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH



PROSENTASE KETAATAN TERHADAP RTRW



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas penyertaan Nya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2023 yang merupakan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selang tahun anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2023 yang disusun atas dasar sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas pada Tahun 2023 diformulasikan menurut Rencana Strategis 2019 - 2023.

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Tahun 2023, hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari dinas untuk mewujudkan *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999. Hasil evaluasi yang diperoleh dari laporan ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa pada Tahun Anggaran 2023 dinilai baik, hal ini dapat dilihat dari sasaran dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2023, dapat dicapai dengan baik. Meskipun kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa tahun 2023 dinilai berhasil, namun demikian masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa tahun 2023 untuk menjadi bahan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa tahun 2023 dan kiranya LKjIP Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi tentang pelaksanaan program-program bidang pekerjaan umum.

Tondano, Januari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa,

DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pembina Utama Muda
NIP. 19680802 200003 1005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2023, disusun atas dasar sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pada Tahun 2023 yang diformulasikan menurut Rencana Strategis 2019-2023.

Adapun sasaran-sasaran strategis untuk mendukung upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2023 pada umumnya telah berhasil dilaksanakan.

Sasaran – sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan IMB
2. Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi
3. Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW/RTR
4. Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air
6. Meningkatkan Pengelolaan Drainase
7. Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak
8. Meningkatkan layanan pengolahan air limbah
9. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Tahun 2023, hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Dinas PUPR untuk mewujudkan *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999.

Hasil evaluasi yang diperoleh dari laporan ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa pada Tahun Anggaran 2023 dinilai baik, hal ini dapat dilihat dari sasaran dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2023, dapat dicapai dengan baik.

Meskipun kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa tahun 2023 dinilai berhasil, namun demikian masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang, antara lain:

- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya Fasilitas Ruang Kantor dan perlengkapannya.

- Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.
- Dukungan dana yang cukup, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sasaran lain yang keberhasilannya masih dapat ditingkatkan dalam pengukuran pencapaian sasaran akan terus diupayakan untuk mengoptimalkan kontribusi setiap sasaran dalam pencapaian kinerja secara keseluruhan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.2.2. Struktur Organisasi	2
1.2.3. Personil	5
1.2.4. Peralatan dan Perlengkapan	5
1.3. Permasalahan Utama	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.1.1. Visi	7
2.1.2. Misi	7
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	7
2.1.4. Strategis	13
2.2. Perencanaan Kinerja Tahunan	14
2.3. Target Nasional	23
2.3.1. Air Minum dan Sanitasi	23
2.3.2. Irigasi	23
2.3.3. Jalan	24
2.4. Perjanjian Kinerja	24
2.5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja	28
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	29
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2023	31
3.1.3. Perbandingan Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra	33
3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Nasional ...	38
3.2. Analisis Capaian Kinerja	39
3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
3.4. Strategi Pemecahan Masalah	74
3.5. Akuntabilitas Keuangan	74
BAB IV PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	77
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu di dalam LKjIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban menyusun LKjIP Tahun 2023 dan menyerahkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP Dinas ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Minahasa yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

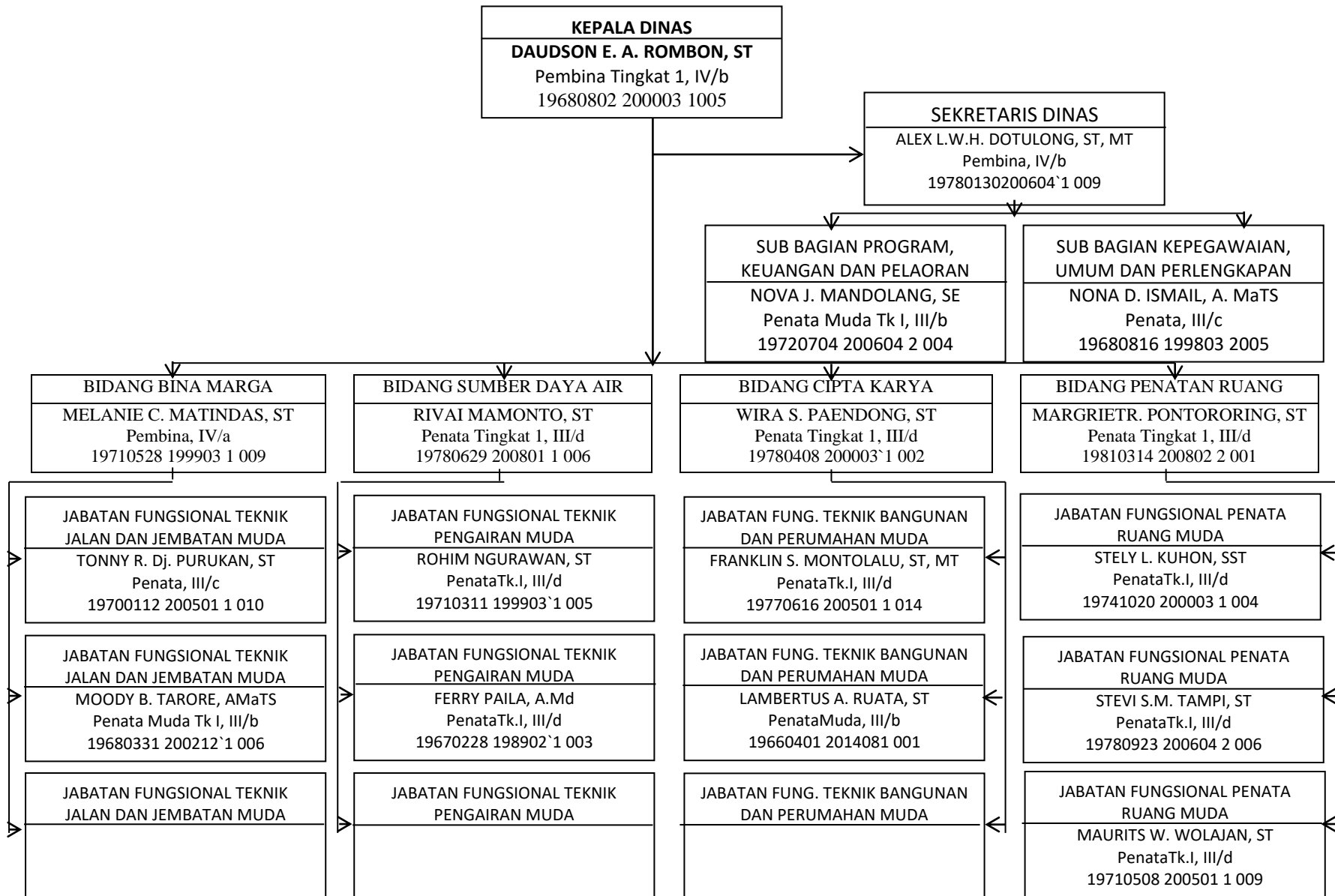
- a. Koordinasi penyusunan program Dinas, mengacu pada program Nasional dan Daerah
- b. Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- c. Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air
- d. Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi dan Pengawasan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi dan Pengawasan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- f. Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi dan Pengawasan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah
- g. Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi dan Pengawasan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- h. Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi dan Pengawasan Pengembangan Permukiman
- i. Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi dan Pengawasan Penataan Bangunan Gedung
- j. Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
- k. Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan

1.2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
 - b. Sub. Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Marga terdiri dari:
Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Muda sebanyak 3 orang
 4. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
Jabatan Fungsional Teknik Bangunan dan Perumahan Muda sebanyak 3 orang
 5. Bidang Pengembangan Sumber daya Air
Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Muda sebanyak 3 orang
 6. Bidang Penataan Ruang terdiri dari:
Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda sebanyak 3 orang



1.2.3. PERSONIL

Untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan 58 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan rincian sebagai berikut:

1. Klasifikasi menurut Golongan:
 - Golongan IV : 5 orang
 - Golongan III : 52 orang
2. Klasifikasi menurut Pendidikan:
 - SLTA : 2 orang
 - Sarjana Muda : 3 orang
 - Sarjana : 50 orang
 - Pasca Sarjana (S2) : 3 orang
3. Jabatan Struktural dan Fungsional:
 - Eselon Iib : 1 Orang
 - Eselon IIIa : 1 Orang
 - Eselon IIIb : 4 Orang
 - Eselon IV : 2 Orang
 - Jabatan Fungsional Ahli Muda: 9 Orang

Selain PNS, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR juga didukung oleh 38 orang Tenaga Harian Lepas, 4 orang Petugas Kebersihan, serta 1 orang Sopir. Tugas Pokok THL adalah membantu melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Minahasa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022, yaitu melaksanakan pengendalian, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraann urusan pemerintahan yang meliputi Pengelolaan Sumber Daya Air, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Persampahan, Sistem Air Limbah, Sistem Drainase, Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Penyelenggaraan Jalan, Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi, serta Penyelenggaraan Penataan Ruang. Rincian 38 orang THL di Dinas PUPR adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi menurut pembagian unit kerja:
 - Sekretariat : 13 orang
 - Bidang Bina Marga : 5 orang
 - Bidang Cipta Karya : 9 orang
 - Bidang SDA : 4 orang
 - Bidang Tata Ruang : 5 orang
2. Klasifikasi Menurut Pendidikan:
 - Sarjana Teknik Sipil/Arsitektur: 8 orang
 - Sarjana Non Teknik Sipil/Arsitektur: 17 orang
 - SLTA/sederajat: 13 orang

2.1.1. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Di samping jumlah dan kualitas personil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung sejumlah peralatan dan perlengkapan kerja berupa:

- Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum : 1 Unit
- Gedung Workshop : 1 unit
- Kendaraan Roda 4 (empat) : 2 Unit
- Tronton : 1 Unit
- Excavator Mini : 1 Unit
- Excavator Besar : 2 Unit
- Peralatan Kantor

2.2. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama yang dihadapi di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya database yang memadai sehingga capaian kinerja tidak terukur dengan baik dan akurat. Hal ini karena tidak didukung oleh dana untuk penyusunan database.

2. Tidak adanya Perencanaan Teknis (DED) yang lengkap untuk pekerjaan konstruksi, sehingga berpengaruh terhadap waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi. Hal ini karena tidak didukung oleh dana untuk penyusunan DED.
3. Anggaran yang sangat minim karena tidak didukung oleh Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi, Air Minum dan Sanitasi.
4. Masalah Pembebasan Tanah untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Baru karena tidak didukung oleh anggaran ganti untung untuk pembebasan tanah.

Hal ini berdampak pada capaian Kinerja tahun 2023. Selain itu masalah yang masih sering dihadapi adalah masalah sosial di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga dibutuhkan pendekatan yang baik. Di samping permasalahan di atas, yang tidak bisa dihindari dan memang harus diantisipasi adalah masalah cuaca yang kadang tak bisa diprediksi sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Visi

Visi Dinas PUPR Kabupaten Minahasa sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”.

2.1.2. Misi

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa adalah:

“Mewujudkan pengembangan kewilayaan dengan perinsip Pembangunan berkelanjutan“

dan

“Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diuraikan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Dinas menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu

1. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten
 - b. Meningkatkan Penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten
 - c. Meningkatkan Kepatuhan IMB
 - d. Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi

2. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang, dengan sasaran Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW/RTR
3. Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Persampahan dan Drainase, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - b. Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten
 - c. Meningkatkan Pengelolaan Drainase
5. Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak
 - b. Meningkatkan layanan pengolahan air limbah
6. Meningkatkan Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan dan Kinerja, dengan sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder

Table 1
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI
1	2	3
1. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	1. Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Melaksanakan Pengembangan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten
	2. Meningkatkan Penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten
	3. Meningkatkan Kepatuhan IMB	Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
	4. Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Melaksanakan Pengembangan Jasa Konstruksi

2. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Meningkatkan ketaatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang	Melaksanakan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang
3. Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten Minahasa	Melaksanakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Persampahan dan Drainase	1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Minahasa	Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air
	2. Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
	3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase di Kabupaten Minahasa	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	1. Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	2. Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Meningkatkan Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan dan Kinerja	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melaksanakan Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan dan Kinerja
		Melaksanakan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dan stakeholder

Tabel 2
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	MISI	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian & Target Kinerja					
					Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kondisi akhir
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
1	Misi 3: Mewujudkan Pengembangan Wilayah Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	61,3%	65,16%	69,42%	70,1%	78,17%	72%	72%
		Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	68,8%	68,8%	75%	68%	65%	65%	65%
		Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	6,20%	6,20%	11,32%	15,10%	-	-	25,95%
		Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	82,5%	87,2%	90,5%	93,8%	75%	100%	100%
		Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,85	0,858	0,886	0,873	88,2%	0,889	0,889
		Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	69%	71,05%	73%	74%	77%	75%	75%
		Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	N/a	N/a	N/a	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase dan Persampahan	49,41%	50,14%	51,86%	53,86%	52,67%	53%	53%

		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0363	0,0394	0,0477	0,0525	0,0525	0,0525	0,0525
		Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	7,43%	7,43%	10,57%	10,57%	10,57%	24,55	24,55
		Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Prosesntase Panjang drainase primer dan Sekunder dalam kondisi baik	54%	54%	54%	60%	53,30%	64%	64%
2	Misi 4: Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	61,47%	62,19%	62,80%	63,06%	67,22%	68,69%	68,69%
		Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	78,6%	81,05%	82,48%	83,66%	84,25%	85,99%	85,99%
		Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68,3%	69,1%	69,78%	70,07%	70,79%	72,99%	72,99%
3	Misi 5: Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	-	-	B	BB	BB
			Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah						4	
		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/a	86,83	86,83	87,5	88,23%	89,85	89,85

2.1.4.Strategi (Cara Mencapai tujuan dan sasaran)

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

1). Strategi

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, Dinas PUPR telah menetapkan Strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengembangan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten
2. Melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten
3. Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
4. Melaksanakan Pengembangan Jasa Konstruksi
5. Melaksanakan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang
6. Melaksanakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten
7. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air
8. Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
9. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
10. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
11. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
12. Melaksanakan Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan dan Kinerja
13. Melaksanakan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dan stakeholder

2). Program.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi guna mencapai sasaran. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Permukiman
2. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

3. Program Penataan Bangunan Gedung
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
8. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
10. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
11. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

2.2. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, di dalam rencana kinerja ditetapkan pula rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana kinerja memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel 3
RENCANA KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2023
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Melaksanakan Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan dan Kinerja serta Melaksanakan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dan stakeholder	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4
				<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi</i>	<i>12 Bulan</i>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>
				Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	69 paket

			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Lap
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Lap
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	<i>100%</i>
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>12 Bulan</i>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Lap
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2 Unit

				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
2	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air	PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani Jaringan Irigasi	5,25%
				<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penanganan Prasarana dan Sarana Pengaman pantai dan sungai di Kabupaten</i>	-
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dok.
				<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada</i>	94%
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	65 m
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.446.00 m
	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	PENGLOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase panjang drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik	64%	

			Drainase	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Panjang Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten dalam Kondisi baik</i>	600 m
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	600 m
3	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi	Meningkatkan akses terhadap air minum	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	85,99%
				<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pemenuhan Dokumen RISPAM Kabupaten/kota</i>	1 dok
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	7 Dok.
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	20 Ltr/dtk
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Kawasan perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	1,5 Ltr/dtk
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan Perdesaan	350 SR
				Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

			Air Limbah	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T</i>	<i>10 rumah</i>
				Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	10 m3
4	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	0,889
				<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting</i>	600 Dok.
				Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, seta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	600 Dok.
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok.
		Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Melaksanakan Pengembangan Jasa Konstruksi	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%
				<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</i>	1 dok

				Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dok.
5	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Melaksanakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten	PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten	72%
				<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota</i>	<i>Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi</i>	7 km
					<i>Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota</i>	681,150
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Pengendalian	1,000
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan / Jembatan	2,000
				Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	5,5 km
				Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di rehabilitasi	1,5 km
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	1 km
				Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	1 unit
				Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi / Terkonstruksi Akibat Bencana	120 m
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen
				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen

6	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Melaksanakan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi/KKPR	100%
				<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen persetujuan substansi evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota</i>	1,00
					<i>Jumlah Dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota</i>	1,00
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	1,00
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1,00
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	3,00
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</i>	1,00
					<i>Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota</i>	1,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1,00
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1,00
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan</i>	40,00

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	40,00
				Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	40,00
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	<i>55,00</i>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	15,00
			Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	15,00
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	40,00

2.3. TARGET NASIONAL

2.3.1. Air Minum dan Sanitasi

Untuk menjamin semua masyarakat punya akses air minum yang layak dan aman, Pemerintah menargetkan 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman di tahun 2020-2024. Hal ini sudah dimandatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS hingga 0% pada akhir tahun 2024.

BPS mencatat, setidaknya ada 91,72% rumah tangga Indonesia yang telah memiliki akses sumber air minum layak pada Maret 2023, dimana di Sulawesi Utara mencapai 94,37% rumah tangga yang telah memiliki akses air minum layak. Pemerintah menargetkan akses masyarakat pada perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau meningkat pada tahun 2024. Hal ini termasuk target 90% sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% akses sanitasi aman, dan ketiadaan rumah tangga yang BAB sembarangan di tempat terbuka. Sedangkan untuk akses air minum, 100% akses air minum layak, termasuk di dalamnya 15% akses air minum aman, ditargetkan pada 2024.

Berdasarkan data BPS Tahun 2022, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak sudah mencapai 80,92% di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Akses sanitasi berkaitan dengan ketersediaan sarana dan perilaku masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM dengan pengertian yaitu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan, dimana outputnya terdiri dari lima pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga.

2.3.2. Irigasi

Target Nasional sebesar 500.000 Ha jaringan irigasi akan dibangun pada tahun 2020 sd. 2024. Target kegiatan 2023 yang dilakukan oleh Ditjen SDA untuk mendukung pertanian di Indonesia meliputi pembangunan Daerah Irigasi seluas 5.500 Ha, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 105.000 Ha serta melanjutkan pembangunan 13 bendungan yang berstatus *on-going*.

2.3.3. Jalan

Target kemantapan Jalan Nasional sebesar 97% pada tahun 2024. Target tersebut akan mengikuti anggaran yang disediakan oleh Negara yang saat ini masih terbatas. Pada tahun 2023 Kementerian PUPR Targetkan Tingkat Kemantapan Jalan Nasional Mencapai 93,57%.

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa telah menetapkan sasaran strategi, indikator kinerja dan target melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dibuat dengan mengacu pada Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja melalui penjabaran program dan Anggaran Tahun 2023. Adapun Sasaran Strategis yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten
2. Meningkatkan Penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten
3. Meningkatkan Kepatuhan IMB
4. Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi
5. Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW/RTR
6. Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten
7. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.
8. Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten
9. Meningkatkan Pengelolaan Drainase
10. Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak
11. Meningkatkan layanan pengolahan air limbah

12. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki indikator kinerja yang pengukurannya berdasarkan presentase dan output kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja masing-masing Eselon II, III, IV serta Pejabat Fungsional terlampir dalam Laporan Kinerja ini.

TABEL 4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Target Tahun 2023
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%
	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	72%
2	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	65%
	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,889
	Meningkatkan Penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa	Presentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	25,98%
	Meningkatkan Penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	100%
	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75%
	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	100%
4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase dan Persampahan	53%
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0525
	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	24,55
	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Prosentase Panjang drainase primer dan Sekunder dalam kondisi baik	64%

5	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	68,69%
	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	85,99%
	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	72,99%
6	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB
	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,85

2.5. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2023

Struktur anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.495.651.000 belanja tidak langsung Rp.5.278.207.606 dan belanja langsung Rp36.851.260.322.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) IKU spesifik dan jelas (Spesific)
- 2) IKU dapat diukur secara objektif (Measurabel)
- 3) IKU dapat dicapai (Achievable)
- 4) IKU untuk kurun waktu tertentu (Time Bound)
- 5) IKU dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable)

Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, juga dapat dilihat sebagai suatu system atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2023, target kinerja (*performance plan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa pada tahun anggaran 2023. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai makna sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5
Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Penilaian Realisasi Kinerja
I	> 90,01%	Sangat tinggi
II	75,01% - 90,00%	Tinggi
III	65,01% - 75,00%	Sedang
IV	50,01% - 65,00%	Rendah
V	≤ 50,00%	Sangat rendah

3.1 CAPAIAN KINERJA

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, secara umum telah berhasil mencapai sasaran strategis yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2023, sampai dengan akhir bulan Desember 2023 telah selesai.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang merupakan

tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indicator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023.

Dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sesuai anggaran yang tersedia, pencapaian target masing-masing indikator kinerja masukan (*inputs*) umumnya mencapai 100%. Keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) pada umumnya mencapai 100% dari rencana tingkat capaian kegiatan. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp567.799.000 dari Target sebesar Rp.1.495.651.000 atau mencapai 37,96%.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

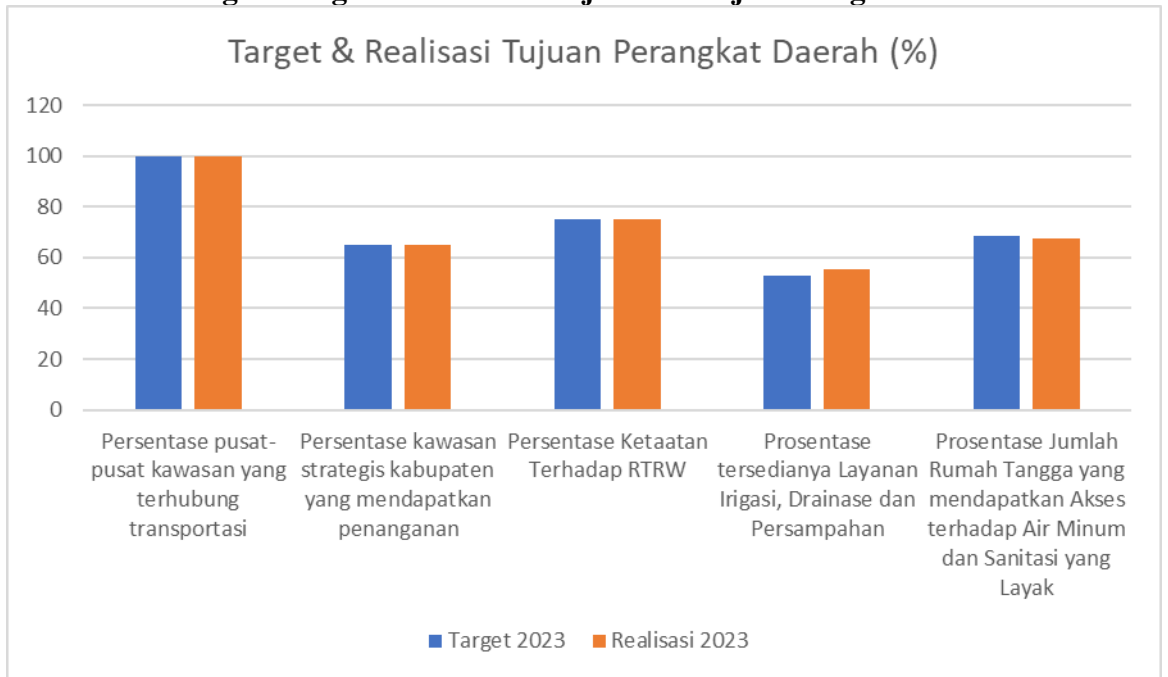
Perbandingan antara target dan realisasi tujuan dan sasaran kinerja kinerja dapat dilihat dalam Tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 6
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

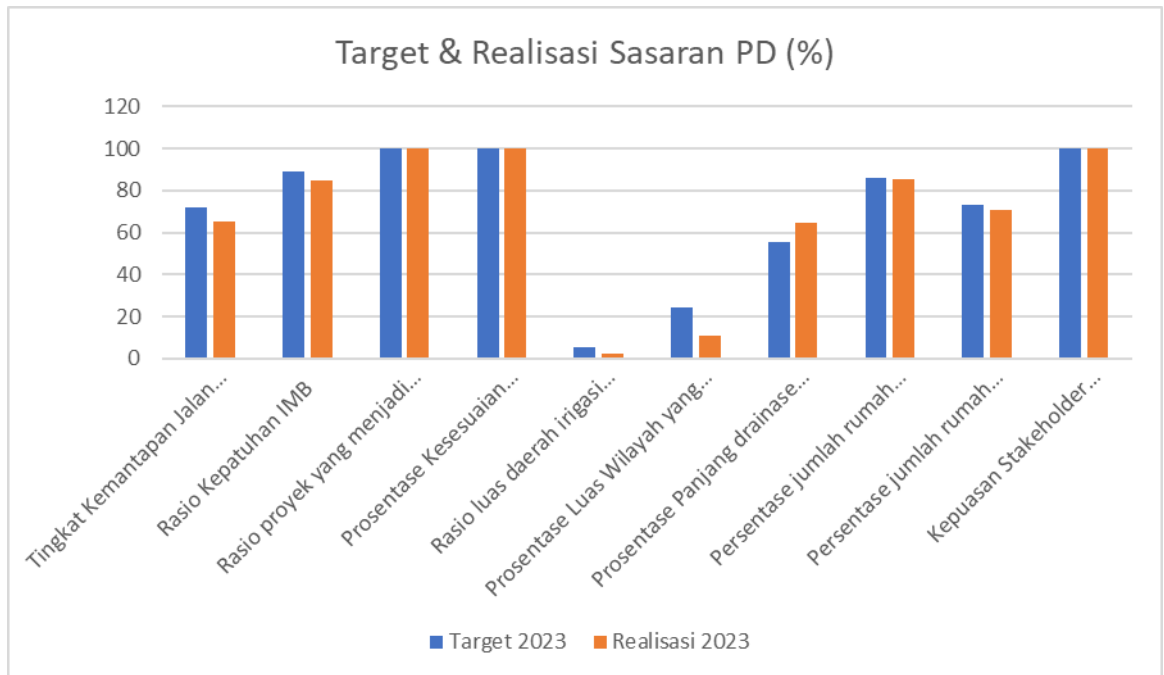
NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023		CAPAIAN (%)	KET.
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%	100%	100%	
	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	72%	65,27%	91%	
2	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	65%	65%	100%	
	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,889	0,850	96%	
	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75%	75%	100%	
	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	100%	100%	100%	
4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase	53%	55,62%	105%	

	Daya Air, Drainase dan Persampahan	dan Persampahan				
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0525	0,0204	39%	
	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	24,55%	10,57%	43%	
	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Prosentase Panjang drainase primer dan Sekunder dalam kondisi baik	64%	64,29%	100%	
5	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	68,69%	67,75%	99%	
	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	85,99%	85,50%	99%	
	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	72,99%	70,80%	97%	
6	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	-		
	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	100%	
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,85			

Grafik 1
Perbandingan Target & Realisasi Tujuan Kinerja Perangkat Daerah



Grafik 2
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Perangkat Daerah



3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021 dengan Tahun 2023

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2023

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	REALISASI KINERJA		REAL. TAHUN 2023
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%	100%	100%
	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	70,22%	78,17%	65,27%
	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	65%	65%	65%
	Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	91,50%	75%	75%
	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,871	0,882	0,850
	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%
	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	74%	77%	75%
	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	100%	100%	100%
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase dan Persampahan	52,19%	52,67%	55,62%
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0525	0,0525	0,0204
	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	10,57%	10,57%	10,57%
	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Prosentase Panjang Drainase Primer dan Sekunder dalam Kondisi baik	52,15%	53,30%	64,29%
2	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	64,26%	67,22%	67,75%
	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	83,94%	84,25%	85,50%
	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70,06%	70,79%	70,80%
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C	B	-

	penyelenggaraan pemerintahan daerah				
	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			4
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,30%	88,23%	-

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan capaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2023, target akhir renstra dan selama periode renstra dapat dilihat dalam pada Tabel di bawah ini:

Tabel 8
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan & Sasaran PD sampai dengan Akhir Periode Renstra

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI sd. TAHUN 2023	CAPAIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%	100%	100%	
	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	72%	65,27%	91%	
	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	81,35%	65%	79,90%	
	Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	100%	75%	75%	
	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,889	0,850	95,61%	
	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	
	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	80%	75%	93,75%	
	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	100%	100%	100%	
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase dan Persampahan	60,85%	55,62%	91,40%	
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0525	0,0204	38,85%	

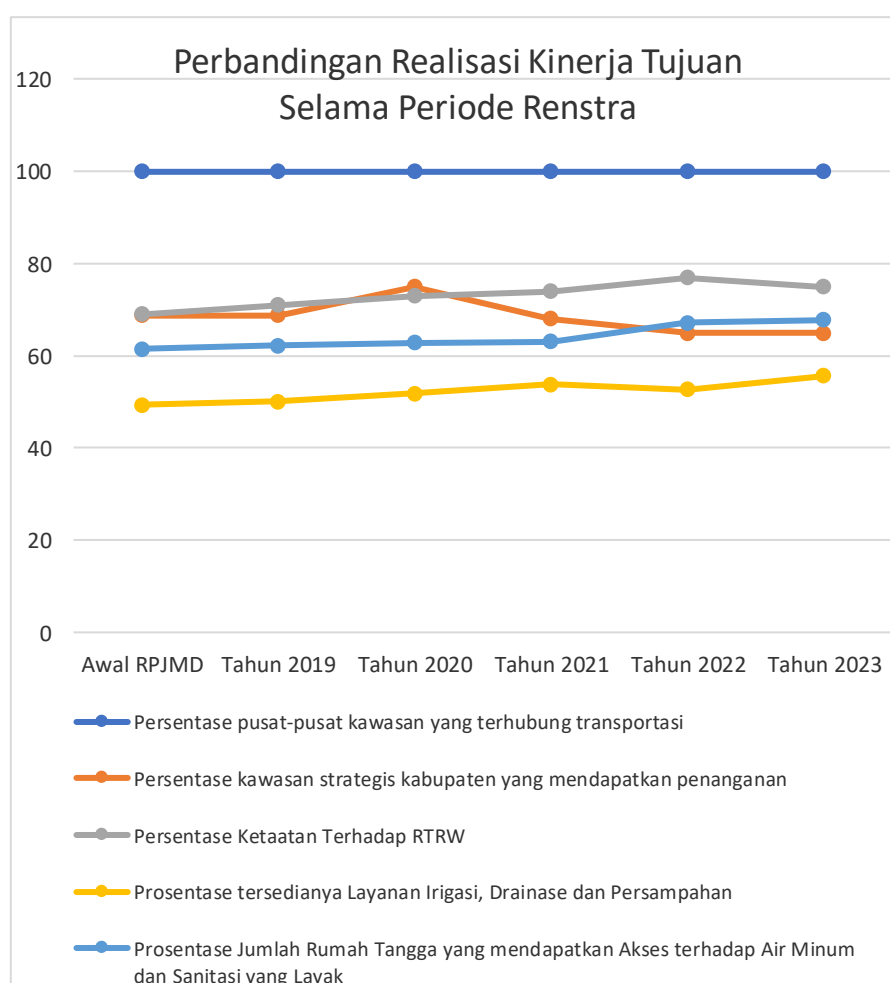
	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	24,55%	10,57%	43,05%	
	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Prosentase Panjang Drainase Primer dan Sekunder dalam Kondisi baik	64%	64,29%	100%	
2	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	65,69%	67,68%	100%	
	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	85,99%	85,50%	99,43%	
	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	72,99%	70,80%	97%	
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	-	-	
	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	4	4	100%	
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,85			

Tabel 9
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Selama Periode Renstra

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Kinerja Selama Periode Renstra				
				Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	68,80%	68,80%	75,00%	68,00%	65,00%	65,00%
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	69,00%	71,05%	73,00%	74,00%	77,00%	75,00%

4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase dan Persampahan	49,41%	50,14%	51,86%	53,86%	52,67%	55,62%
5	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	61,47%	62,19%	62,80%	63,06%	67,22%	67,75%

Grafik 3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Selama Periode Renstra

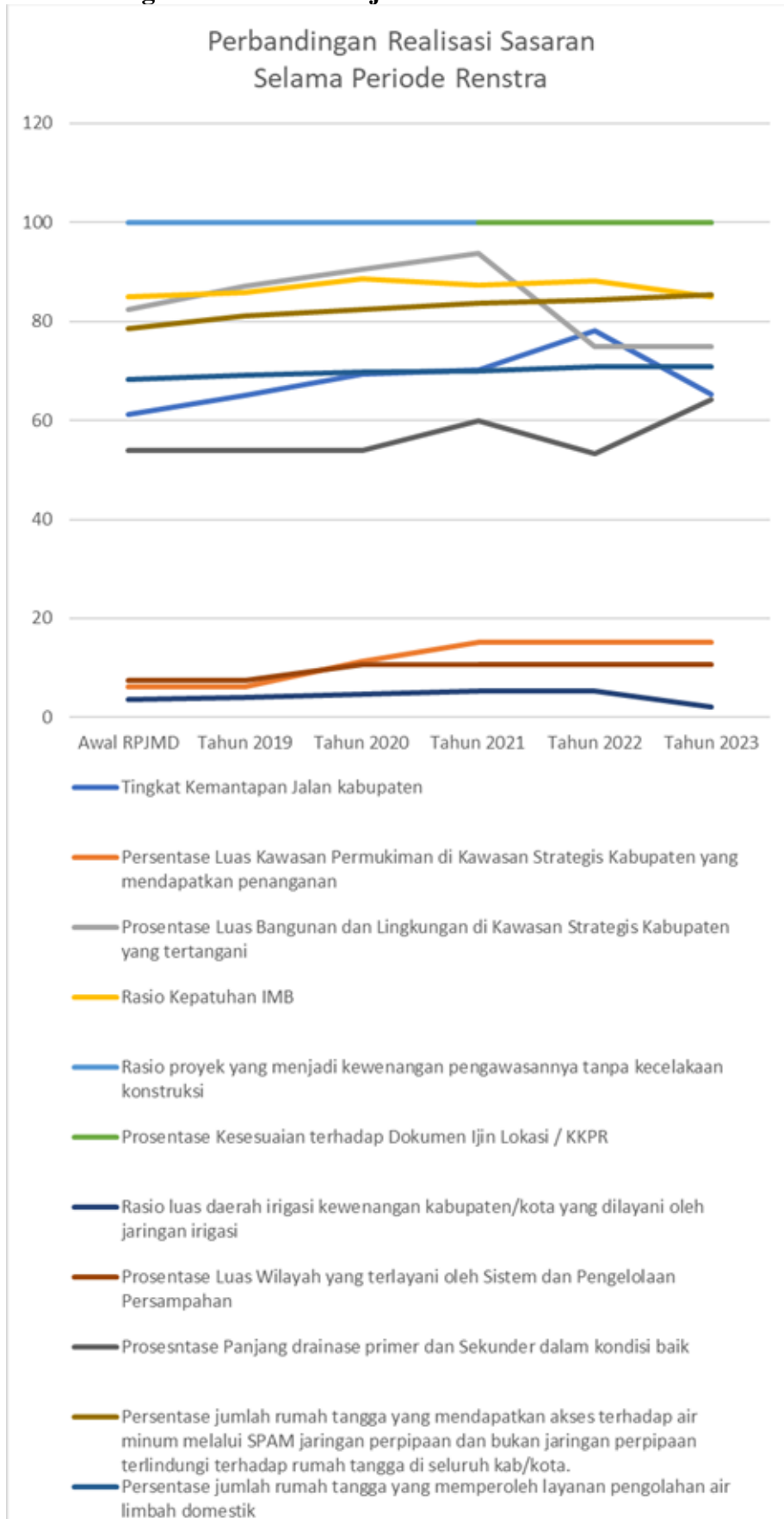


Tabel 10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Selama Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Kinerja Selama Periode Renstra				
				Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	61,30%	65,16%	69,42%	70,10%	78,17%	65,27%

2	Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	6,20%	6,20%	11,32%	15,10%	15,10%	15,10%
3	Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	82,5%	87,20%	90,50%	93,80%	75%	75%
4	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	85,00%	85,80%	88,60%	87,30%	88,20%	85,00%
5	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	N/a	N/a	N/a	100%	100%	100%
7	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	3,63%	3,94%	4,77%	5,25%	5,25%	2,04%
8	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	7,43%	7,43%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%
9	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Prosesntase Panjang drainase primer dan Sekunder dalam kondisi baik	54%	54%	54%	60%	53,30%	64,29%
10	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	78,60%	81,05%	82,48%	83,66%	84,25%	85,50%
11	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68,3%	69,1%	69,78%	70,07%	70,79%	70,80%

Grafik 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Selama Periode Renstra



3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Nasional

1. Air Minum Layak

BPS mencatat, setidaknya ada 91,72% rumah tangga Indonesia yang telah memiliki akses sumber air minum layak pada Maret 2023, dimana di Sulawesi Utara mencapai 94,37% rumah tangga yang telah memiliki akses air minum layak. Dibandingkan dengan capaian Layanan Air Minum Layak Kabupaten Minahasa sesuai data Dinas PUPR baru mencapai 85,50%. Hal ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa masih perlu mengejar ketertinggalan pelayanan Air Minum kepada Masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendanaan proyek Air Minum Tahun Anggaran 2023 yang tidak didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Air Minum, sedangkan kemampuan pendanaan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sangat kecil.

2. Sanitasi Layak

Berdasarkan data BPS pada Bulan Maret Tahun 2023, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak sudah mencapai 80,92% di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan capaian Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Minahasa sesuai data Dinas PUPR baru mencapai 70,80%. Hal ini menyimpulkan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa masih perlu mengejar ketertinggalan pelayanan Sanitasi kepada Masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendanaan proyek Sanitasi Tahun Anggaran 2023 yang tidak didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Sanitasi, sedangkan kemampuan pendanaan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sangat kecil.

3. Irigasi

Target Nasional sebesar 500.000 Ha jaringan irigasi akan dibangun pada tahun 2020 sd. 2024. Target kegiatan 2023 yang dilakukan oleh Ditjen SDA untuk mendukung pertanian di Indonesia meliputi pembangunan Daerah Irigasi seluas 5.500 Ha, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 105.000 Ha serta melanjutkan pembangunan 13 bendungan yang berstatus *on-going*. Dibandingkan dengan kinerja irigasi yang dilaksanakan melalui Dinas PUPR pada tahun 2023 yang hanya mencapai 92,70 Ha, maka dinilai sangat jauh

dengan capaian Nasional. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendanaan proyek Irigasi Tahun Anggaran 2023 yang tidak didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Irigasi, sedangkan kemampuan pendanaan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sangat kecil.

4. Jalan

Pada Tahun 2023 Tingkat Kemantapan Jalan Nasional mencapai 93,57%. Capaian ini berbeda sangat jauh dengan capaian tingkat kemantapan jalan Kabupaten Minahasa yang baru mencapai 65,27%. Untuk itu, masih sangat diperlukan usaha dalam rangka peningkatan tingkat kemantapan jalan Kabupaten Minahasa.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2023 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur capaian target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 dan Penetapan Kinerja 2023, juga dengan melakukan analisis–analisis terhadap target–target dari Indikator kinerja utama.

1. Sekretariat

Capaian Sekretariat adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Kinerja Sekretariat

SASARAN KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KET.
			TARGET	REAL.	CAPAIAN	
<i>Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100,00%</i>	
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00%	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00%	
<i>Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100,00%</i>	

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	69 Orang	57 Orang	82,61%	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 laporan	1 laporan	100,00%	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68 Paket	69 paket	86 paket	124,64%	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40 Paket	1 paket	2,50%	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	50 Paket	2 paket	4,00%	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	48 Lap	1 Lap	2,08%	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Lap	70 Lap	11 lap	15,71%	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100,00%	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6 Unit	6 unit	100,00%	
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	24 Lap	24 Lap	100,00%	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	12 Lap	12 Lap	100,00%	
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	2 Unit	1 Unit	50,00%	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00%	
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	1 Unit	1 Unit	100,00%	

2. Bidang Bina Marga

Capaian Bidang Bina Marga adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Capaian Kinerja Bidang Bina Marga

SASARAN KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KET.
			TARGET	REAL.	CAPAIAN	
<i>Meningkatnya Kemantapan Jalan di Kabupaten Minahasa</i>	<i>Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi</i>	64,091 km	7 km	8,73 km	124,71%	
	<i>Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap</i>		490,4 km			
	<i>Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota</i>	681,15 km	681,150	880,42 km	129,25%	
Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Pengendalian	2 dok	1,00	2,00	200,00%	
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan / Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan / Jembatan	5 dok	2 dok	4 dok	200,00%	

Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	28,133 km	5,5 km	6,81 Km	123,82%	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di rehabilitasi	35,958 km	1,5 km	1,92 Km	128,00%	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	22,749 km	1 km	6,84 Km	684,00%	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	-	1 unit	8 Unit	800,00%	
Terlaksananya Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi / Terekonstruksi Akibat Bencana	-	120 m	120 Meter	100,00%	
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	-	1 Dok	1 Dok	100,00%	
Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	-	2 Dok	3 Dok	150,00%	

Prosentase capaian kinerja di tahun 2023 bidang Bina Marga untuk pekerjaan utama semuanya lebih dari 100%, bahkan capaian Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi mencapai 124,71%. Hal ini karena penyelenggaraan jalan selain ditopang oleh dana DAK dan DAU.



Foto 1
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Minahasa Tahun 2023

3. Bidang Sumber Daya Air

Capaian Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Capaian Kinerja Bidang Sumber Daya Air

SASARAN KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KET.
			TARGET	REAL.	CAPAIAN	
<i>Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penanganan Prasarana dan Sarana Pengaman pantai dan sungai di Kabupaten</i>	<i>2 paket</i>	-	-	-	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	-	1 Dok.	1 Dok.	100,00%	
<i>Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder</i>	<i>Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada</i>	<i>92%</i>	<i>94%</i>	<i>94%</i>	<i>100,00%</i>	
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.091,55	55 m	148 m	269%	
Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	904	530.00 m	1.415.69 m	267%	

Indikator utama kegiatan Sumber Daya Air Tahun 2023 adalah Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi. Prosentase capaian untuk Tahun 2023 sesuai target yaitu 38,85%. Untuk indikator capaian Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada untuk Tahun 2023, capaiannya sesuai target atau mencapai 100%.



Foto 2

Kegiatan Penanganan Jaringan Irigasi Tahun 2023

4. Bidang Cipta Karya.

Capaian Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya

SASARAN KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KET.
			TARGET	REAL.	CAPAIAN	
<i>Tercapainya Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Minahasa</i>	<i>Pemenuhan Dokumen RISPAM Kabupaten/kota</i>	-	1 dok	1 dok	100,00%	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	7 Dok	7 Dok.	7 Dok.	100,00%	
Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	400 SR	20 Ltr/dtk	20 Ltr/dtk	100,00%	
Meningkatnya Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Kawasan perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu		1,5 Ltr/dtk	2 ltr/dtk	133,33%	
Meluasnya Jaringan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan Perdesaan	120 SR	350 SR	36 SR	10,29%	

Tersedianya Sistem Air Limbah Domestik di Kabupaten Minahasa	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	689 unit	350 rumah	35 rumah	10,00%	
Meningkatkan Kapasitas IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	0,097 m3/hari	10 M3	10 m3	100,00%	
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase di Kabupaten Minahasa	Panjang Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten dalam Kondisi baik	1.112 m	600 m	600 m	100,00%	
Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	-	600 m	600 m	100,00%	
Meningkatnya Ijin Mendirikan Bangunan di kabupaten Minahasa	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting	119	600 Dok.	510 Dok	85,00%	
Terselenggaranya Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, seta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	119	600 Dok.	510 Dok	85,00%	
Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1 Dok.	1 Dok.	100,00%	
Terpenuhinya Data Jasa Konstruksi	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 dok	1 dok	1 dok	100,00%	
Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 dok	1 Dok.	1 Dok.	100,00%	

Tingkat Capaian kinerja Bidang Cipta Karya di tahun 2023 pada umumnya mencapai lebih dari 100%. Hanya saja terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target yang diharapkan karena terjadi pengurangan/pergeseran anggaran. Untuk tingkat capaian Jumlah IMB yang

diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting sangat rendah yaitu hanya mencapai 85%, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 11,9% atau sebanyak 119 dokumen. Hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dimana masyarakat yang mengurus PBG masih menyesuaikan dengan system yang baru.



Foto 3
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Tahun 2023



Foto 4
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Tahun 2023

5. Bidang Penataan Ruang

Capaian Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Capaian Kinerja Bidang Tata Ruang

SASARAN KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KET.
			TARGET	REAL.	CAPAIAN	
<i>Tersedianya Dokumen Pendukung Penetapan STRW dan RRTR Kabupaten Minahasa</i>	<i>Jumlah Dokumen persetujuan substansi evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota</i>	1 dok	1	1	100,00%	
	<i>Jumlah Dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota</i>	1 dok	1	1	100,00%	
Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	1 dok	1	1	100,00%	
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-	1	1	100,00%	
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 dok	3	3	100,00%	
<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</i>	<i>Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</i>	1 dok	1	1	100,00%	
	<i>Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota</i>	-	1	1	100,00%	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 dok	1	1	100,00%	
Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	-	1	1	100,00%	
<i>Tersedianya Rekomendasi Pemanfaatan Ruang</i>	<i>Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan</i>	35 dok	40	40	100,00%	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	35 dok	40	40	100,00%	
<i>Tercapainya Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Minahasa</i>	<i>Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	15 dok	55	55	100,00%	

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	15 dok	15	15	100,00%	
Terlaksananya Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	-	15	15	100,00%	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	40 dok	40	40	100,00%	

Untuk bidang Tata Ruang, di tahun 2023 semua capaian kinerja 100%.

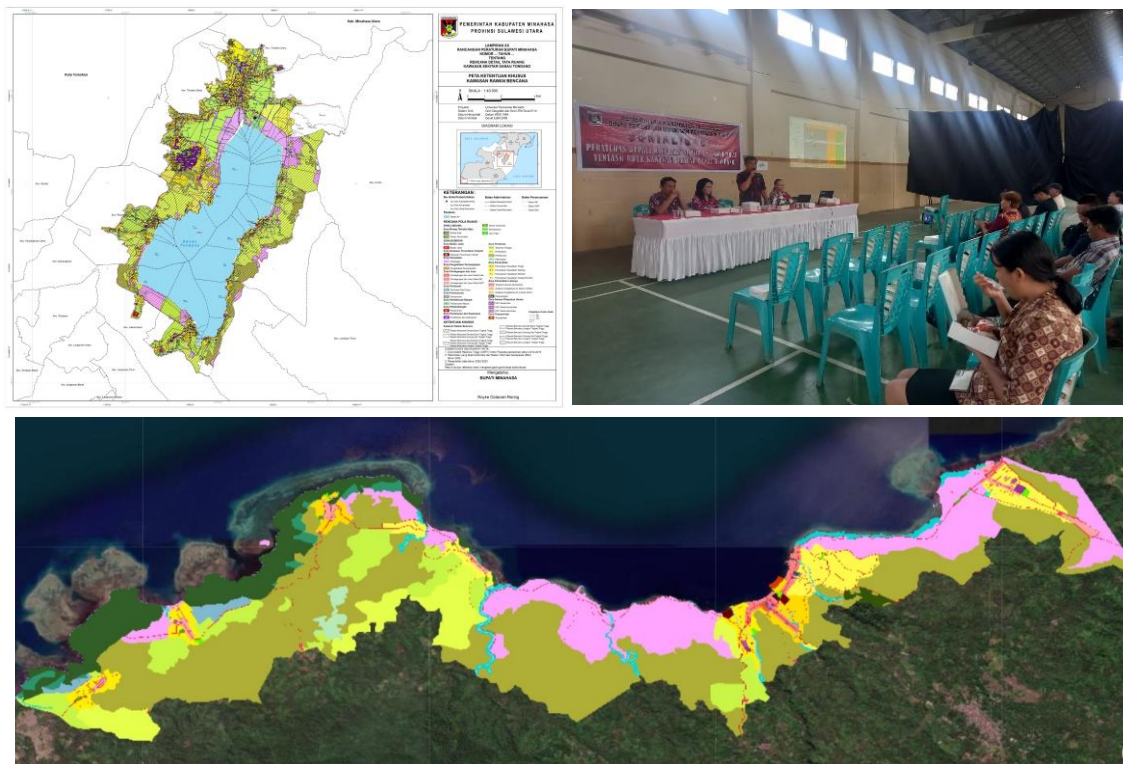


Foto 5
Kegiatan Bidang Tata Ruang Tahun 2023

Dibandingkan dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir yaitu mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa terus mengalami peningkatan. Ini terlihat dari semakin mantapnya keadaan jalan, semakin tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat, semakin terpenuhinya kebutuhan air bersih serta sanitasi bagi penduduk, dan terbangunnya serta terpeliharanya sarana dan prasarana pemerintahan.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa secara umum Kinerja Dinas Tahun 2023 dinilai berhasil. Walaupun kegiatan yang direncanakan dinilai berhasil dilaksanakan dengan baik, namun masih dijumpai beberapa masalah yang timbul baik masalah internal maupun eksternal, yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa bidang belum mendapatkan alokasi dana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Masih terdapat beberapa Program yang belum didanai atau dana belum cukup, yaitu:
 - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (belum ada alokasi dana)
 - Program Pengembangan Permukiman (belum ada alokasi dana)
 - Program Bangunan dan Lingkungan (dana tersedia sangat minim)
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (dana tersedia sangat minim)
 - Program Penataan Bangunan Gedung (dana tersedia sangat minim)
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (dana tersedia sangat minim)
- b. Masih kurang memadainya sarana penunjang operasional, seperti alat ukur (jarak, debit, kuat tekan, dll), alat survey, dan peralatan keteknikan lainnya.
- c. Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa di atas level 1, yang memiliki kompetensi untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Belum dianggarkannya penyusunan database Air Minum, Sanitasi, Drainase, Persampahan, dan Bangunan Gedung.
- e. Kurangnya tingkat ketelitian dalam penyusunan Rencana DED karena tidak didukung oleh dana yang cukup untuk pengadaan Konsultan Perencana.
- f. Belum maksimalnya system penyajian data.

3.3. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini ditinjau dari dua aspek yaitu personil dan anggaran. Dari segi jumlah personil, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa ada sebanyak 57 orang ASN. Berdasarkan hasil Analisa Beban Kerja (ABK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2023, dari kebutuhan pegawai sebanyak 98 ASN, baru

terpenuhi sebanyak 57 ASN sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 41 ASN. Hal tersebut menjadi kendala dalam menyelesaikan program kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Selain itu dari sisi tingkat keahlian, masih banyak ASN yang belum mengikuti pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Namun demikian, dari jumlah sumber daya yang ada, kita optimalkan sepenuhnya demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur Pendidikan/pelatihan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa.

Tabel 14
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ryang Kabupaten Minahasa Menurut Pendidikan Tahun 2023

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
SD	-
SLTP	-
SLTA	2 Orang
D1	-
D2	-
D3	3 Orang
D4 / S1	49 Orang
S2	3 orang
JUMLAH	57 orang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa juga telah melakukan terobosan/Inovasi dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Inovasi ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan output dan outcome yang tepat sasaran. Inovasi tersebut meliputi:

1. Penerapan Sistem Pelaporan dan Monitoring Proyek Konstruksi (SIPROYEK) berbasis Web. SIPROYEK sebagai alat monitoring proyek konstruksi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan aksesibilitas informasi untuk diterapkan pada tahapan

pelaksanaan dan pengawasan proyek konstruksi. SIPROYEK juga sebagai alat Pemantauan Kinerja, Perekaman semua catatan proyek (buku direksi) yang dicatat oleh PA/KPA, PPTK, PPK dan Pengawas serta dapat merekam dan melaporkan pemantauan masyarakat terhadap proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan.

2. Penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Teknis Jalan (SIMEJA). Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi pengawasan teknis jalan dengan menggunakan system informasi secara online sehingga proses monitoring dan evaluasi mudah diakses, informative dan akuntabel yang dapat dilakukan secara terus menerus selama 24 jam penuh, 7 jam dalam seminggu, dan 365 hari dalam setahun tanpa mengenal jarak dan waktu. Dengan menggunakan aplikasi ini memungkinkan segala sesuatu menjadi terintegrasi, lengkap dan tepat sasaran, dan output rekomendasi untuk hasil pengawasan teknis sesuai pekerjaan yang dilaksanakan.

Sedangkan ditinjau dari segi anggaran, pada tahun 2023 ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa mendapatkan anggaran untuk belanja sebesar Rp.42.129.467.928. Dari anggaran yang ada, dioptimalkan untuk pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi pengoptimalan anggaran ini antara lain dengan pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran kedalam kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Tabel 15
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	PROSENTASE ANGGARAN (%)
1	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	7.012.033.215	16,64
2	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani Jaringan Irigasi	765.839.893	1,82
3	Meningkatkan akses terhadap air minum	Prosentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	6.076.886.537	14,42

4	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	108.597.995	0,26
5	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Prosentase panjang drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik	157.138.090	0,37
6	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	554.573.640	1,32
7	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	12.000.000	0,03
8	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten	25.656.620.453	60,90
9	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi/KKPR	1.785.778.105	4,24
JUMLAH			42.129.467.928	100

Tabel 16
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2023			ANGGARAN TAHUN 2023			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			TARGET	REAL.	CAPAIAN	TARGET	REAL.	PENY. (%)		
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	100,00%	7.012.033.215	6.646.868.340	94,79%		
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.131.488</i>	<i>36.131.488</i>	<i>100,00%</i>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	100,00%	24.995.000	24.995.000	100,00%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	100,00%	11.136.488	11.136.488	100,00%		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100,00%</i>	<i>5.286.282.606</i>	<i>5.016.602.360</i>	<i>94,90%</i>		

Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang	57 Orang	82,61%	5.278.207.606	5.016.602.360	95,04%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	8.075.000	-	0,00%
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100,00%</i>	<i>55.944.000</i>	<i>55.470.000</i>	<i>99,15%</i>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	69 paket	86 paket	124,64%	55.944.000	55.470.000	99,15%
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100,00%</i>	<i>177.749.991</i>	<i>169.926.565</i>	<i>95,60%</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	1 paket	2,50%	590.000	590.000	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	50 Paket	2 paket	4,00%	48.106.923	43.786.400	91,02%

Kantor	Kantor yang Disediakan						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00%	22.521.068	19.191.000	85,21%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Lap	1 Lap	2,08%	9.600.000	9.600.000	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Lap	11 lap	15,71%	96.932.000	96.759.165	99,82%
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100,00%</i>	<i>228.348.560</i>	<i>225.000.000</i>	<i>98,53%</i>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 unit	100,00%	228.348.560	225.000.000	98,53%
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.107.589.020</i>	<i>1.037.633.040</i>	<i>93,68%</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24 Lap	24 Lap	100,00%	27.589.020	16.198.040	58,71%

	Disediakan						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100,00%	1.080.000.000	1.021.435.000	94,58%
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100,00%</i>	<i>119.987.550</i>	<i>106.104.887</i>	<i>88,43%</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1 Unit	50,00%	56.117.550	42.947.887	76,53%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100,00%	4.380.000	4.125.000	94,18%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00%	59.490.000	59.032.000	99,23%

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani Jaringan Irigasi	5,25%	2,04%	38,86%	765.839.893	747.147.838	97,56%	Belum ada dokumen RKPPPL sehingga terhambat dalam penyusunan dokumen UPL-UKL	Berkoordinasi dengan Dinas Terkait (Dinas Lingkungan Hidup)
	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penanganan Prasarana dan Sarana Pengaman pantai dan sungai di Kabupaten</i>	-	-	-	150.000.000	136.848.784	91,23%		
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dok.	1 Dok.	100,00%	150.000.000	136.848.784	91,23%		
	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada</i>	94%	94%	100,00%	615.839.893	610.299.054	99,10%		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	65 m	148 m	227,69%	403.210.514	398.321.800	98,79%		

	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.446.00 m	1.415.69 m	97,90%	212.629.379	211.977.254	99,69%		
Meningkatkan akses terhadap air minum	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	85,99%	85,50	99,43%	6.076.886.537	5.809.485.148	95,60%	Sumber air jauh dari permukiman penduduk sehingga target sulit dicapai	Perlu penambahan anggaran agar target dapat dicapai
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pemenuhan Dokumen RISPAM Kabupaten/kota</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>	<i>100,00%</i>	<i>6.076.886.537</i>	<i>5.809.485.148</i>	<i>95,60%</i>		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	7 Dok.	7 Dok.	100,00%	333.292.560	323.770.000	97,14%		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	20 Ltr/dtk	20 Ltr/dtk	100,00%	4.446.999.394	4.277.480.643	96,19%		

	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Kawasan perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	1,5 Ltr/dtk	2 ltr/dtk	133,33%	1.116.855.883	1.029.529.805	92,18%		
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan Perdesaan	350 SR	36 SR	10,29%	179.738.700	178.704.700	99,42%		
Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	72,99%	70,80%	97,00%	108.597.995	90.661.238	83,48%	Belum dianggarkan penyusunan database sanitasi	Mengupayakan alokasi dana yang cukup pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar</i>	<i>350 rumah</i>	<i>35 rumah</i>	<i>10,00%</i>	<i>108.597.995</i>	<i>90.661.238</i>	<i>83,48%</i>		

		<i>menggunakan SPALD S dan SPALD T</i>							
	Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	10 M3	10 m3	100,00%	108.597.995	90.661.238	83,48%	
Meningkatkan Pengelolaan Drainase	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase panjang drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik	64%	64,29%	100,45%	157.138.090	155.948.380	99,24%	
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Panjang Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten dalam Kondisi baik</i>	<i>600 m</i>	600 m	100,00%	<i>157.138.090</i>	<i>155.948.380</i>	<i>99,24%</i>	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	600 m	600 m	100,00%	157.138.090	155.948.380	99,24%	
Meningkatkan Kepatuhan IMB	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	0,889	0,850	95,61%	554.573.640	502.820.000	90,67%	
	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting</i>	<i>600 Dok.</i>	<i>510 Dok</i>	<i>85,00%</i>	<i>554.573.640</i>	<i>502.820.000</i>	<i>90,67%</i>	

	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, seta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	600 Dok.	510 Dok	85,00%	549.473.640	502.820.000	91,51%		
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok.	1 Dok.	100,00%	5.100.000	-	0,00%		
Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100,00%	12.000.000	12.000.000	100,00%		
	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>	<i>100,00%</i>	<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000</i>	<i>100,00%</i>		

		<i>pengawasannya</i>								
	Penyusunan Data dan Informasi/Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi/Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dok.	1 Dok.	100,00%	12.000.000	12.000.000	100,00%		
Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten	72%	65,27%	90,65%	25.656.620.453	24.874.577.310	96,95%	Adanya perubahan SK Bupati Minahasa tentang Penetapan ruas-ruas jalan Kabupaten Minahasa yang semula 681,15km menjadi 880,42km	Penanganan jalan yang kondisi rusak berat dan rusak ringan untuk menaikkan kemantapan jalan
	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota</i>	<i>Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi</i>	<i>7 km</i>	<i>8,73</i>	<i>124,71%</i>	<i>25.656.620.453</i>	<i>24.874.577.310</i>			
		<i>Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota</i>	<i>681,150</i>	<i>880,42 km</i>	<i>129,25%</i>					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Pengendalian	1,000	2,00	200,00%	572.485.511	554.981.283	96,94%		

Jalan dan Jembatan								anggaran ganti untung untuk pembebasan tanah
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan / Jembatan	2 dok	4 dok	200,00%	686.557.500	684.207.000	99,66%	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	5,5 km	6,81 Km	123,82%	14.793.174.970	14.214.448.128	96,09%	
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di rehabilitasi	1,5 km	1,92 Km	128,00%	7.859.067.472	7.690.160.799	97,85%	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	1 km	6,84 Km	684,00%	360.000.000	356.168.500	98,94%	
Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	1 unit	8 Unit	800,00%	720.000.000	713.170.600	99,05%	
Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi / Terkonstruksi Akibat Bencana	120 m	120 Meter	100,00%	80.000.000	79.630.000	99,54%	
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi	1 Dok	1 Dok	100,00%	18.000.000	17.400.000	96,67%	

		Penyelenggaraan Jalan/Jembatan							
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dok	3 Do	150,00%	567.335.000	564.411.000	99,48%	
Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi/KKPR	100%	100%	100,00%	1.785.778.105	1.676.518.459	93,88%	
	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen persetujuan substansi evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota</i>	<i>1,000</i>	<i>1</i>	<i>100,00%</i>	<i>968.642.921</i>	<i>905.962.759</i>	<i>93,53%</i>	
		<i>Jumlah Dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota</i>	<i>1,000</i>	<i>1</i>	<i>100,00%</i>				
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	1,000	1	100,00%	723.102.921	691.283.524	95,60%	

Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1,000	1	100,00%	22.000.000	21.840.000	99,27%
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	3,000	3	100,00%	223.540.000	192.839.235	86,27%
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</i>	<i>1,000</i>	<i>1</i>	<i>100,00%</i>	<i>13.101.200</i>	<i>3.724.000</i>	<i>28,42%</i>
	<i>Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota</i>	<i>1,000</i>	<i>1</i>	<i>100,00%</i>			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1,000	1	100,00%	2.750.000	-	0,00%
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1,000	1	100,00%	10.351.200	3.724.000	35,98%

<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan</i>	40,000	40	100,00%	109.799.984	108.459.000	98,78%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	40,000	40	100,00%	109.799.984	108.459.000	98,78%
	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	40,000	40	100,00%			
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	55,000	55	100,00%	694.234.000	658.372.700	94,83%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	15,000	15	100,00%	11.500.000	5.915.000	51,43%
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil	15,000	15	100,00%	10.234.000	8.942.700	87,38%

	(PPNS) Bidang Penataan Ruang	(PPNS) Bidang Penataan Ruang							
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	40,000	40	100,00%	672.500.000	643.515.000	95,69%	
JUMLAH					112,73%	42.129.467.928	40.516.026.713	96,17%	

Tabel 17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN	PENY. (%)	EFISIENSI
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00%	94,79%	5,21%
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	0,00%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100,00%</i>	<i>94,90%</i>	<i>5,10%</i>
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82,61%	95,04%	-12,43%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	0,00%	100,00%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100,00%</i>	<i>99,15%</i>	<i>0,85%</i>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	124,64%	99,15%	25,48%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100,00%</i>	<i>95,60%</i>	<i>4,40%</i>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,50%	100,00%	-97,50%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00%	91,02%	-87,02%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	85,21%	14,79%

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2,08%	100,00%	-97,92%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,71%	99,82%	-84,11%
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	100,00%	98,53%	1,47%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,00%	98,53%	1,47%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	100,00%	93,68%	6,32%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	58,71%	41,29%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	94,58%	5,42%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100,00%	88,43%	11,57%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50,00%	76,53%	-26,53%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00%	94,18%	5,82%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	99,23%	0,77%
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani Jaringan Irigasi	38,86%	97,56%	-58,70%
	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penanganan Prasarana dan Sarana Pengaman pantai dan sungai di Kabupaten</i>	-	91,23%	

	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	100,00%	91,23%	8,77%
	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada</i>	100,00%	99,10%	0,90%
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	227,69%	98,79%	128,90%
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	97,90%	99,69%	-1,79%
Meningkatkan akses terhadap air minum	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	99,43%	95,60%	3,83%
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pemenuhan Dokumen RISPAM Kabupaten/kota</i>	100,00%	95,60%	4,40%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	100,00%	97,14%	2,86%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100,00%	96,19%	3,81%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Kawasan perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	133,33%	92,18%	41,15%
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan Perdesaan	10,29%	99,42%	-89,14%
Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,00%	83,48%	13,52%

	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T</i>	10,00%	83,48%	-73,48%
	Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	100,00%	83,48%	16,52%
Meningkatkan Pengelolaan Drainase	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase panjang drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik	100,45%	99,24%	1,21%
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Panjang Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten dalam Kondisi baik</i>	100,00%	99,24%	0,76%
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	100,00%	99,24%	0,76%
Meningkatkan Kepatuhan IMB	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	95,61%	90,67%	4,95%
	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting</i>	85,00%	90,67%	-5,67%
	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, seta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	85,00%	91,51%	-6,51%
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	0,00%	100,00%
Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100,00%	0,00%
	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</i>	100,00%	100,00%	0,00%

	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	100,00%	100,00%	0,00%
Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten	90,65%	96,95%	-6,30%
	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota</i>	<i>Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi</i>	124,71%		124,71%
		<i>Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota</i>	129,25%		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Pengendalian	200,00%	96,94%	103,06%
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan / Jembatan	200,00%	99,66%	100,34%
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	123,82%	96,09%	27,73%
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di rehabilitasi	128,00%	97,85%	30,15%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	684,00%	98,94%	585,06%
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	800,00%	99,05%	700,95%
	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi / Terkonstruksi Akibat Bencana	100,00%	99,54%	0,46%
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	100,00%	96,67%	3,33%
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	150,00%	99,48%	50,52%
	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi/KKPR	100,00%	93,88%

<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen persetujuan substansi evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota</i>	100,00%	93,53%	6,47%
	<i>Jumlah Dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota</i>	100,00%		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	100,00%	95,60%	4,40%
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	100,00%	99,27%	0,73%
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	100,00%	86,27%	13,73%
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</i>	100,00%	28,42%	71,58%
	<i>Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota</i>	100,00%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	100,00%	0,00%	100,00%
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	100,00%	35,98%	64,02%
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan</i>	100,00%	98,78%	1,22%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100,00%	98,78%	1,22%
	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	100,00%		
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	100,00%	94,83%	5,17%

Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100,00%	51,43%	48,57%
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	100,00%	87,38%	12,62%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100,00%	95,69%	4,31%
JUMLAH		112,73%	96,17%	16,55%

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi efisiensi untuk beberapa sasaran mulai dari 1,21% sampai dengan 13,52%. Secara keseluruhan efisiensi sebesar 16,55%.

3.4. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 dan seterusnya, maka langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai strategi Pemecahan Masalah dan sebagai langkah antisipatif di tahun berikutnya (Tahun 2024) adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan alokasi dana yang cukup pada setiap bidang sehingga dapat menunjang capaian kinerja. Caranya adalah dengan mengusulkan kegiatan kepada Pemerintah Pusat yang dapat dikerjakan melalui pendanaan APBN seperti: Program PAMSIMAS, SANIMAS, Jalan Daerah dan RPIP.
- b. Mengupayakan pengadaan sarana penunjang kegiatan dan dana operasional penunjang kegiatan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan fisik di setiap bidang.
- c. Meningkatkan kapasitas keahlian teknis/fungsional aparatur, melalui pendidikan formal maupun non formal.
- d. Untuk penanganan secara komprehensif yang berkelanjutan perlu adanya dukungan dana untuk survey, investigasi dan desain.

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 sebesar Rp.42.129.467.928,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.40.516.026.713,00 atau 96,17% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi keuangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 18
Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.115.228267,00	9.547.274.324,00	94,39
2	DAU Kesehatan	1.353.223.443,00	1.257.090.055,00	92,90
3	DAU Pekerjaan Umum	6.051.557.500,00	5.928.111.526,00	97,96
4	DAK	14.217.308.320,00	13.870.249.495,00	97,56
5	SILPA DAK	569.995.671,00	550.560.875,00	96,59
6	PAD	2.000.560.689,00	1.849.053.980,00	92,43
7	DBH	6.023.815.933,00	5.825.167.999,00	96,70
8	Pendapatan Hibah	1.062.675.184,00	985.234.935,00	92,71
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	735.102.921,00	703.283.524,00	95,67
	JUMLAH	42.129.467.928,00	40.516.026.713,00	96,17

Selanjutnya realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 19
Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE PENYERAPAN (%)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	7.012.033.215	6.646.868.340	94,79
2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani Jaringan Irigasi	765.839.893	747.147.838	97,56

3	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	6.076.886.537	5.809.485.148	95,60
4	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	108.597.995	90.661.238	83,48
5	PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase panjang drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik	157.138.090	155.948.380	99,24
6	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	554.573.640	502.820.000	90,67
7	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	12.000.000	12.000.000	100,00
8	PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten	25.656.620.453	24.874.577.310	96,95
9	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi/KKPR	1.785.778.105	1.676.518.459	93,88
JUMLAH			42.129.467.928	40.516.026.713	96,17

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan media pertanggung jawaban instansi pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2023 yang merupakan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian indikator sasaran terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dikategorikan berhasil, walaupun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam peningkatan kinerja di tahun berikut.

4.2. SARAN

Diharapkan hasil laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kami dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2023, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlunya dibuat sebuah system pengumpulan dan pengolahan data kinerja dengan cara yang efisien dan efektif, yang mampu menyediakan data yang akurat untuk setiap indikator capaian kinerja. Data tersebut diisi oleh pemilik

sumber data primer seperti Pemerintah Desa ataupun setiap Keluarga di Kabupaten Minahasa.

- b. Keterbatasan dana untuk Pembangunan Fisik membuat target dan capaian kinerja Dinas PUPR meningkat dengan pertambahan yang kecil. Untuk itu perlu dilakukan inovasi dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
- c. Perlunya memanfaatkan seluruh sumber daya peralatan yang ada seperti peralatan laboratorium dengan melatih sumber daya manusia (Staf) yang ada.
- d. Kemajuan Iptek yang menuntut Pemerintah untuk terus mengembangkan dan memberikan solusi pelayanan yang lebih cepat, akurat dan valid kepada masyarakat. Untuk itu, perlunya membuat inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan, kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas PUPR.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2023 ini disusun, semoga bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DAUDSON E. A. ROMBON, ST**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si**

Jabatan : Bupati Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, 4 Januari 2023

Pihak Kedua,

Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

Pihak Pertama,

DAUDSON E. A. ROMBON, ST

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	25,98%
2.	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,889 %
3.	Meningkatkan Penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	100 %
4.	Menekan terjadinya Kecelakaan Konstruksi	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %
5.	Meningkatkan ketaatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi/KKPR	100 %
6.	Meningkatkan Kemantapan Jalan di Kabupaten Minahasa	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	72,00 %
7.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Minahasa	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	5,25 %
8.	Meningkatkan Layanan Persampahan di Kabupaten Minahasa	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh sistem dan Pengelolaan Persampahan	24,55 %
9.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase di Kabupaten Minahasa	Prosentase Panjang Drainase Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	64,00 %
10.	Meningkatkan Akses Terhadap Air Minum yang Layak di Kabupaten Minahasa	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	85,99 %
11.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Minahasa	Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	72,99 %
12.	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Pengembangan Permukiman	0,00	
2.	Program Penataan Bangunan Gedung	234.250.080,00	
3.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	0,00	
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	12.000.000,00	
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.077.530.594,00	
6.	Program Penyelenggaraan Jalan	20.105.837.153,00	
7.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	288.523.768,00	
8.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0,00	

9.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	97.139.257,00	
10.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	842.323.940,00	
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	90.999.996,00	
12.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.847.950.735,00	

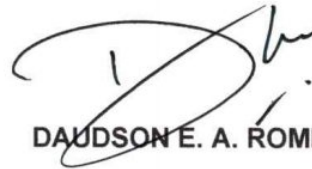
Tondano, 4 Januari 2023

BUPATI MINAHASA,



Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,



DAUDSON E. A. ROMBON, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALEX L. W. H. DOTULONG ST, MT**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAUDSON E. A. ROMBON, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa

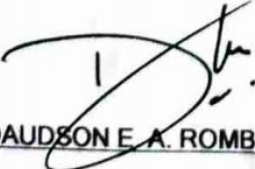
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai ilampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,


DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pihak Pertama,


ALEX L. W. H. DOTULONG, ST, MT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	12 Bulan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan
3	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
6	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan
7	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.695.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.182.028.000,00	
3	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.944.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.451.991,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228.348.560,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.589.020,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.987.550,00	
JUMLAH ANGGARAN		6.715.044.121,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,


DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pihak Pertama,


ALEX L. W.H. DOTULONG, ST, MT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVA J. MANDOLANG, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Pelaporan,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Minahasa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALEX L. W. H. DOTULONG, ST, MT**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,

ALEX L. W. H. DOTULONG, ST, MT

Pihak Pertama,

NOVA J. MANDOLANG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	58 ASN
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.995.000,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.700.000,00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.176.878.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.150.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		5.214.723.000,00	

Pihak Kedua,



ALEX L. W.H. DOTULONG, ST, MT

Tondano, Januari 2023

Pihak Pertama,



NOVA J. MANDOLANG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NONA DJAMILAH ISMAIL, AMaTS**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Minahasa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALEX L. W. H. DOTULONG, ST, MT**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,

ALEX L. W. H. DOTULONG, ST, MT

Pihak Pertama,

NONA DJAMILAH ISMAIL, AMaTS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58 Paket
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
5	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 lap
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 lap
7	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Lap
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 lap
10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Operasional Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit
11	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	10 unit
12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.944.000,00	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	590.000,00	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.106.923	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.521.068	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.600.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.634.000	
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.348.560,00	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.589.020,00	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	928.000.000,00	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.117.550,00	
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000,00	
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.490.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		1.500.321.121,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,



ALEX L. W.H. DOTULONG, ST, MT

Pihak Pertama,



NONA DJAMILAH ISMAIL, AMaTS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MELANIE C. MATINDAS, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAUDSON E. A. ROMBON, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai ilampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,


DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pihak Pertama,


MELANIE C. MATINDAS, ST

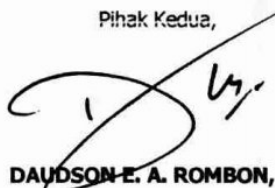
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan di Kabupaten Minahasa	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	7 km
		Panjang Jalan dalam kondisi mantap	490,4 km
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	681,15 km

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	19.840.022.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		19.840.022.000,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,



DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pihak Pertama,



MELANIE C. MATINDAS, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TONNY R. DJ. PURUKAN, ST**
Jabatan : **Teknik Jalan dan Jembatan Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MELANIE C. MATINDAS, ST**
Jabatan : **Kepala Bidang Bina Marga**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai ilampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

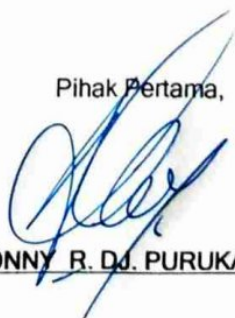
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,


MELANIE C. MATINDAS, ST

Pihak Pertama,


TONNY R. DJ. PURUKAN, ST

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Pengendalian	1 dok
2	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jala / Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan / Jembatan	1 dok
3	Terlaksananya Jalan yang dilakukan Rekonstruksi	Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	1,855 km
4	Terlaksananya Jalan yang dilakukan Rehabilitasi	Panjang Jalan yang dilakukan rehabilitasi jalan	1,645 km
5	Terlaksananya Jalan Yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan	425 m
6	Terlaksananya Jembatan Yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	2,56 m
7	Terlaksananya Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	60 m

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	160.331.680,00	
2	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	432.382.500,00	
3	Rekonstruksi Jalan	11.831.600.000,00	
4	Rehabilitasi Jalan	6.215.707.820,00	
5	Pemeliharaan Rutin Jalan	400.000.000,00	
6	Rehabilitasi Jembatan	720.000.000,00	
7	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	80.000.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		19.840.022.000,00	

Pihak Kedua,



MELANIE C. MATINDAS, ST

Tondano, Januari 2023

Pihak Pertama,



TONNY R. DJ. PURUKAN, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOODY B. TARORE, A.MaTS**
Jabatan : Teknik Jalan dan Jembatan Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MELANIE C. MATINDAS, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai ilampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,

MELANIE C. MATINDAS, ST

Pihak Pertama,

MOODY TARORE, A.MaTS

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Pengendalian	1 dok
2	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jala / Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan / Jembatan	1 dok
3	Terlaksananya Jalan yang dilakukan Rekonstruksi	Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	1,855 km
4	Terlaksananya Jalan yang dilakukan Rehabilitasi	Panjang Jalan yang dilakukan rehabilitasi jalan	1,645 km
5	Terlaksananya Jalan Yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan	425 m
6	Terlaksananya Jembatan Yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	2,56 m
7	Terlaksananya Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	60 m

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	160.331.680,00	
2	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	432.382.500,00	
3	Rekonstruksi Jalan	11.831.600.000,00	
4	Rehabilitasi Jalan	6.215.707.820,00	
5	Pemeliharaan Rutin Jalan	400.000.000,00	
6	Rehabilitasi Jembatan	720.000.000,00	
7	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	80.000.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		19.840.022.000,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,



MELANIE C. MATINDAS, ST

Pihak Pertama,



MOODY B. TARORE, A.MaTS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIVAI MAMONTO, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAUDSON E. A. ROMBON, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai ilampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,


DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pihak Pertama,


RIVAI MAMONTO, ST


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	94%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	570.015.893,00	
JUMLAH ANGGARAN		570.015.893,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,



DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pihak Pertama,



RIVAI MAMONTO, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROHIM NGURAWAN, ST**
Jabatan : **Teknik Pengairan Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RIVAI MAMONTO, ST**
Jabatan : **Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa**


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai ilampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,


RIVAI MAMONTO, ST

Pihak Pertama,


ROHIM NGURAWAN, ST

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang direhabilitasi	27,5 m
2	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	265 m

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	402.630.514,00	
2	Operasi dan Jaringan Irigasi Permukaan	167.385.379,00	
JUMLAH ANGGARAN		570.015.893,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,



RIVAI MAMONTO, ST

Pihak Pertama,



ROHIM NGURAWAN, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERRY A. PAILA, A.Md
Jabatan : Teknik Pengairan Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIVAI MAMONTO, ST
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai ilampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,

RIVAI MAMONTO, ST

Pihak Pertama,

FERRY A. PAILA, A.Md

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang direhabilitasi	27,5 m
2	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	265 m

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	402.630.514,00	
4	Operasi dan Jaringan Irigasi Permukaan	167.385.379,00	
JUMLAH ANGGARAN		570.015.893,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,



RIVAI MAMONTO, ST

Pihak Pertama,



FERRY A. PAILA, A.Md



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars**
Jabatan : **Kepala Bidang Tata Ruang**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAUDSON E. A. ROMBON, ST**
Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai ilampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,



DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pihak Pertama,



MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Pendukung Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten Minahasa	Jumlah Dokumen persetujuan substansi evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen
3	Tersedianya Rekomendasi Pemanfaatan ruang	Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	40 dokumen
4	Tercapainya Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Minahasa	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	55 lokasi

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota	696.126.921,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	13.101.200,00	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	109.799.984,00	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	684.234.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		1.503.262.105,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,


DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pihak Pertama,


MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAURITS W. WOLAJAN, ST**
Jabatan : **Penata Ruang Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars**
Jabatan : **Kepala Bidang Tata Ruang**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,

MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars

Pihak Pertama,

MAURITS W. WOLAJAN, ST

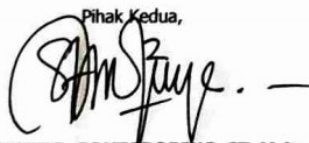
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA

1	2	3	4
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	1/3 dok
2	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada	1/3 dok
3	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 dok
4	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1/3 dok
5	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1/3 dok
6	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah	13,33 dok
7	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5 dok
8	Terlaksananya Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang	6,67 kasus
9	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	13,33 dok

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	550.586.921,00	
2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	22.000.000,00	
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	123.540.000,00	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2.750.000,00	
5	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	10.351.200,00	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pmbangunan Daerah	109.799.984,00	
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Hukum Bidang Penataan Ruang	11.500.000,00	
8	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10.234.000,00	
9	Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	662.500.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		1.503.262.105,00	

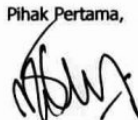
Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,



MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars

Pihak Pertama,



MAURITS W. WOLAJAN, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **STENLY L. KUHON, SST**
Jabatan : **Penata Ruang Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars**
Jabatan : **Kepala Bidang Tata Ruang**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,

MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars

Pihak Pertama,

STENLY L. KUHON, SST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	1/3 dok
2	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada	1/3 dok
3	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 dok
4	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1/3 dok
5	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 dok
5	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1/3 dok
6	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah	13,33 dok
7	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5 dok
8	Terlaksananya Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang	6,67 kasus
9	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	13,33 dok

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	550.586.921,00	
2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	22.000.000,00	
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	123.540.000,00	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2.750.000,00	
5	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	10.351.200,00	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pmbangunan Daerah	109.799.984,00	
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Hukum Bidang Penataan Ruang	11.500.000,00	
8	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10.234.000,00	
9	Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	662.500.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		1.503.262.105,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,



MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars

Pihak Pertama,



STENLY L. KUHON, SST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **STEVI S. M. TAMPI, ST**
Jabatan : **Penata Ruang Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars**
Jabatan : **Kepala Bidang Tata Ruang**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,

MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars

Pihak Pertama,

STEVI S. M. TAMPI, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	1/3 dok
2	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada	1/3 dok
3	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 dok
4	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1/3 dok
5	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1/3 dok
6	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah	13,33 dok
7	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakn Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakn Hukum Bidang Penataan Ruang	5 dok
8	Terlaksananya Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang	6,67 kasus
9	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	13,33 dok

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	550.586.921,00	
2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	22.000.000,00	
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	123.540.000,00	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2.750.000,00	
5	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	10.351.200,00	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pmbangunan Daerah	109.799.984,00	
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Hukum Bidang Penataan Ruang	11.500.000,00	
8	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10.234.000,00	
9	Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	662.500.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		1.503.262.105,00	

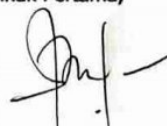
Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,



MARGRIET R. PONTORORING, ST, M.Ars

Pihak Pertama,



STEVI S. M. TAMPI, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIRA S. PAENDONG, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAUDSON E. A. ROMBON, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa

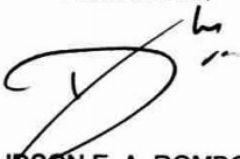
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai ilampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

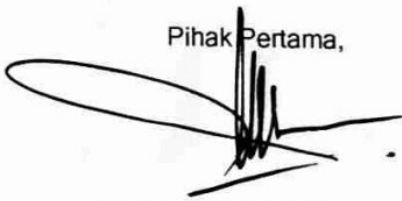
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,


DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pihak Pertama,


WIRA S. PAENDONG, ST

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Minahasa	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting	600 dok
2	Terpenuhinya Data Jasa Konstruksi	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 dok
3	Meningkatnya kualitas Sistem Drainase di Kabupaten Minahasa	Panjang Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten dalam Kondisi baik	600 m
4	Tercapainya Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Minahasa	Pemenuhan Dokumen RISPAM Kabupaten/kota	1 dok
5	Tersedianya Sistem Air Limbah Domestik di Kabupten Minahasa	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	10 rumah

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	204.850.080,00	
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	97.139.257,00	
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	4.989.323.940,00	
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	90.999.996,00	
JUMLAH ANGGARAN		5.394.313.273,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,


DAUDSON E. A. ROMBON, ST

Pihak Pertama,


WIRA S. PAENDONG, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANKLIN S. MONTOLALU, ST, MT
Jabatan : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIRA S. PAENDONG, ST
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,

WIRA S. PAENDONG, ST

Pihak Pertama,

FRANKLIN S. MONTOLALU, ST, MT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA**

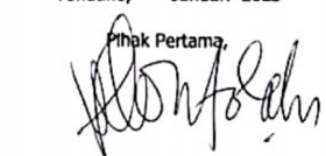
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3,5 dok
2	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 liter/detik
3	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK / Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perdesaan	0,75 liter/detik
4	Meluasnya Jaringan SPAM Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang diperluas di kawasan perdesaan	175 unit
5	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	72,99%
6	Persentase Panjang Drainase Primer Dan Sekunder Dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Drainase Primer Dan Sekunder Dalam Kondisi Baik	55,45%
7	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300 dok
8	Tertaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	1/2 kegiatan
9	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1/2 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	333.323.940,00	
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.447.000.000,00	
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	104.000.000,00	
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	105.000.000,00	
5	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	90.999.996,00	
6	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	97.139.257,00	
7	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	199.750.080,00	
8	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	5.100.000,00	
9	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	12.000.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		5.394.313.273,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua

WIRA S. PAENDONG, ST

Pihak Pertama

FRANKLIN S. MONTOLALU, ST, MT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LAMBERTUS A. RUATA, ST**
Jabatan : **Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRA S. PAENDONG, ST**
Jabatan : **Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Minahasa**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjanya yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,

WIRA S. PAENDONG, ST

Pihak Pertama,

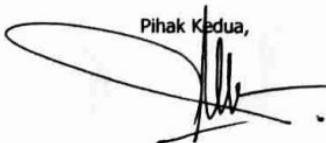
LAMBERTUS A. RUATA, ST

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA**


NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3,5 dok
2	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 liter/detik
3	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK / Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perdesaan	0,75 liter/detik
4	Meluasnya Jaringan SPAM Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang diperluas di kawasan perdesaan	175 unit
5	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	72,99%
6	Persentase Panjang Drainase Primer Dan Sekunder Dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Drainase Primer Dan Sekunder Dalam Kondisi Baik	55,45%
7	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300 dok
8	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	1/2 kegiatan
9	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1/2 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	333.323.940,00	
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.447.000.000,00	
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	104.000.000,00	
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	105.000.000,00	
5	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	90.999.996,00	
6	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	97.139.252,00	
7	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	199.750.080,00	
8	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	5.100.000,00	
9	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	12.000.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		5.394.313.268,00	

Tondano, Januari 2023

Pihak Kedua,


WIRA S. PAENDONG, ST

Pihak Pertama,


LAMBERTUS A. RUATA, ST